

ANALISIS POLITIK BEBAS AKTIF INDONESIA DALAM MENGHADAPI DILEMA NETRALITAS DI TENGAH GREAT POWER COMPETITION ASIA TENGGARA

Ifan Kiki Kurniawan¹, Dinda Fhelicia², Sapriya³, Rika Sartika⁴

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Email Korespondensi: ifankurniawan@upi.edu

Email: fheliciadinda@upi.edu; sapriya@upi.edu; rikasartika@upi.edu

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of Indonesia's free and active foreign policy in facing the dilemma of neutrality amid increasing Great Power Competition between the United States and China in the Indo-Pacific region. The rivalry between these two major powers has created geopolitical, economic, and security pressures that directly impact Indonesia's diplomatic maneuverability. Through a literature review, this study examines various recent publications on Indonesia's foreign relations, hedging strategies, geopolitics, and regional defense and economic policies. The findings show that Indonesia is in a complex position between economic dependence on China and strategic cooperation in defense with the United States. To maintain strategic autonomy and consistency with the principles of free and active diplomacy, Indonesia implements a hedging strategy by maintaining a balance in its relations with both countries. This study concludes that free and active diplomacy remains relevant, but requires strategic adaptation so that Indonesia is able to face global geopolitical dynamics without losing its independence and national interests.

Keywords: Active Free Policy, Great Power Competition, Hedging Strategy.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam menghadapi dilema netralitas di tengah meningkatnya *Great Power Competition* antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Rivalitas dua kekuatan besar tersebut menimbulkan tekanan geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang berdampak langsung pada ruang gerak diplomasi Indonesia. Melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai literatur terkini mengenai hubungan luar negeri Indonesia, strategi *hedging*, geopolitik, serta kebijakan pertahanan dan ekonomi regional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang kompleks antara ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan kerja sama strategis di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat. Untuk menjaga otonomi strategis dan konsistensi prinsip bebas aktif, Indonesia menerapkan strategi *hedging* dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan terhadap kedua negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik bebas aktif tetap relevan, namun membutuhkan adaptasi strategis agar Indonesia mampu menghadapi dinamika geopolitik global tanpa kehilangan kemandirian dan kepentingan nasional.

Kata kunci: Politik Bebas Aktif, Great Power Competition, Hedging Strategy.

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami sejarah panjang dalam perjalanan politik luar negeri yang di implementasikan dalam hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara di dunia. Perkembangan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar sejak zaman soekarno-hata pada pasca kemerdekaan (Wijayanti, 2022). Kebijakan Indonesia memegang tujuan dasar yang tertera pada alenia pertama pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan mengancam penjajahan di atas dunia. Selanjutnya, pada alenia

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

102

Indexed



SINTA 5



ke empat menekankan bahwa Indonesia harus ikut serta dalam perdamaian dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut maka terciptalah politik bebas aktif Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam kebijakan luar negeri (Azmi et al., 2024). Prinsip bebas menekankan bahwa Indonesia tidak memihak blok manapun tanpa adanya intervensi dari negara luar. Prinsip aktif menekankan pada sifat humanisme untuk memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Syahdami & Rofii, 2022).

Namun, dalam dunia global saat ini terjadi *Great Power Competition* yang mempengaruhi gerakan politik luar negeri negara di dunia. *Great Power Competition* merupakan bentuk persaingan antara negara-negara *super power* dalam mempertahankan dan mendapatkan pengaruh kekuasaan untuk menduduki posisi dominan di dunia (Jatmiko, 2023). Dalam pandangan neoralisme hal ini dianggap sebagai fenomena yang tidak dapat dihindarkan, negara yang memiliki kekuatan besar cenderung memiliki pengaruh dominan dalam sistem internasional (Art et al., 2017).

Di kawasan Indo-pasifik terjadi persaingan antara Amerika, China dan Rusia dalam memperebutkan sumber daya seperti cadangan energi hingga kontrol lahan dan informasi (Effendi et al., 2025). Pada kawasan asia pasifik terjadi rivalitas antara Amerika dan China dalam aspek ekonomi, militer hingga diplomatik pada dekade terakhir. Perang dagang antara Amerika dan China memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Rivalitas ini akhirnya berdampak pada negara-negara kawasan asia tenggara termasuk Indonesia (Nugraheni, 2025).

Di tengah sengitnya *Great Power Competition* yang terjadi di dunia membuat negara di wilayah asia tenggara terkena imbas termasuk Indonesia. Perubahan politik bebas aktif Indonesia biasanya dipengaruhi oleh faktor domestik dan Internasional (Sadewa & Hakiki, 2023) Hal tersebut membuat Indonesia mengalami dilema netralitas. Dalam penelitian kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana politik bebas aktif Indonesia mengalami dilema netralitas di tengah *Great Power Competition* dunia. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai masa depan politik bebas aktif Indonesia dan manuver kebijakan luar negeri Indonesia dalam situasi *Great Power Competition* dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis penelitian terdahulu yang tersedia (Carrera-Rivera et al., 2022) Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai referensi ilmiah sehingga dapat di analisis secara kritis yang berkaitan dengan politik bebas aktif Indonesia. Proses ini diawali dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk portal berita, jurnal, buku, tesis serta disertasi yang relevan dengan pembahasan politik bebas aktif Indonesia dalam menghadapi *Great Power Competition*. Tahap penyaringan diawali dengan seleksi portal berita, artikel jurnal, tesis serta disertasi berdasarkan kriteria utama yakni waktu publikasi maksimal 5 tahun terakhir. Selanjutnya, data yang diperoleh peneliti di analisis sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat. Analisis dilakukan dengan kajian mendalam, penyusunan terstruktur sehingga bisa ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan sikap politik bebas aktif Indonesia dalam menghadapi *Great Power Competition*.

PEMBAHASAN

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Politik bebas aktif merupakan prinsip Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri kepada negara-negara luar. Kebijakan ini tidak terikat terhadap sebuah ideologi yang dianut negara-negara dunia sehingga tidak ada batas dalam berinteraksi antar negara luar (Trijanani., 2025). Politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki kata “bebas” bermakna masyarakat atau bangsa Indonesia bebas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

103

Indexed



SINTA 5



menentukan tindakan dan sikap dalam mengambil kebijakan luar negeri tanpa adanya blok pembatas. Kata “aktif” diimplementasikan dalam tindakan Indonesia memperjuangkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial di (Azmi et al., 2024).

Prinsip bebas aktif Indonesia juga tertera pada konstitusi Indonesia yakni pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Lebih dari pada itu, dalam undang-undang republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus menjaga kepentingan nasioal, memajukan persahabatan antar bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip yang tertera dalam konstitusi.

Great Power Competition

Great power competition atau persaingan kekuatan besar merupakan revalitas strategis antara negara besar yang memiliki pengaruh di dunia. Revalitas ini mempengaruhi dalam bidang politik, ekonomi, hingga militer. Dalam konteks kontemporer persaingan ini sangat terlihat antara Amerika dan China. Negara tersebut memang sangat berpengaruh di dunia sehingga revalitas kedua negara tersebut dapat dirasakan oleh negara-negara lain (Jatmiko, 2023). Persaingan ini tidak selalu berupa konflik militer namun, sering muncul manuver diplomatik, tekanan ekonom, dan penguatan kapasitas militer sebagai bentuk pengaruh.

Balance of Power & Hedging Strategy

Balance of Power dalam konteks model konflik adalah ukuran yang mencerminkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, hal ini mempertimbangkan sumber daya dan kompensasi yang mungkin terjadi setelah konflik. Dalam teori ini menunjukkan sejauh mana kekuatan kelompok dapat mendominasi kelompok lain atau sebaliknya sehingga memengaruhi potensi konflik. Semakin seimbang kekuatan dan distribusi sumber daya antar kelompok, semakin rendah kemungkinan konflik (Tsuchiya, 2024). Dalam konteks hubungan internasional, *balance of power* menjelaskan bagaimana keseimbangan kekuatan antar negara bukan hanya militer atau kekuatan politik namun konsep ini sebagai norma internasional. *Balance of power* menekankan pada pentingnya distribusi kekuatan yang merata sehingga hubungan antar negara seimbang, aman, dan stabil. Teori ini juga menjadi pedoman moral politik dalam diplomasi internasional yang menjelaskan bahwa stabilitas internasional tidak hanya bergantung pada maetrial semata namun harus ada kesepakatan normatif yang menekankan pada setiap negara harus menjaga keseimbangan ini (Yukawa, 2014).

Disisi lain, *hedging strategy* merupakan strategi kebijakan luar negeri dalam menghadapi ketidakpastian dalam sistem internasional. Negara mengambil pendekatan campuran antara kooperatif dan kompetisi yang memungkinkan negara menjaga fleksibilitas dan tidak sepenuhnya bersekutu melainkan menyeimbangkan resiko dan peluang secara bersama (Gonzalez-Pujol, 2024). *hedging strategy* biasanya digunakan sebagai alat kepada mitra untuk memberi sinyal membentuk koalisi sementara, sehingga negara dapat menjalin koalisi kerjasama namun tetap melindungi kepentingan nasional. Strategi ini menjadi sangat efektif digunakan ketika distribusi kekuasaan global atau regional tidak stabil, sehingga bisa membuat negara menyeimbangkan resiko dan peluang secara bersamaan tanpa kehilangan opsi strategis dimasa depan (Koga, 2025).

Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik merupakan gabungan dua disiplin ilmu yakni geografi dan politik. Dalam konteks ini geopolitik membahas terkait kondisi geografis suatu wilayah dapat menimbulkan dan mempengaruhi kebijakan politik, kebijakan luar negeri, keamanan, dan hubungan internasional (Sugiharto Sugiharto et al., 2025). Lebih lanjut, geopolitik merupakan konsep strategis yang sangat kompleks yang melibatkan

antar bangsa, negara dan masyarakat, dalam sebuah kerangka hubungan dan kepentingan bersama (Wati & Ulpah, 2024).

Sementara itu, geostrategi dalam hubungan internasional merupakan kajian yang membahas terkait dengan hubungan aspek geografis dalam strategi politik untuk mencapai tujuan sebuah negara (Naja, 2025). Lebih lanjut, geostrategi merupakan konsep yang megarah pada penerapan strategis dari geopolitik agar dapat mengelola dan memanfaatkan kondisi geografi, demografi, dan sumber daya negara untuk kepentingan nasional (Subakdi & Benedictus Roring, 2024).

Bentuk Dilema Netralitas Indonesia Dari Persepektif Pertahanan Dan Ekonomi

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghadapi dilema besar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara dua kekuatan utama dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok terutama di tengah rivalitas strategis yang semakin intens di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan Tiongkok dan dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia menempatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai komponen strategis dalam kebijakan luar negerinya. Kolaborasi tersebut berperan penting dalam memperkuat stabilitas kawasan sekaligus meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Bentuk kemitraan strategis Indonesia-AS mencakup latihan militer bersama, program pendidikan dan pelatihan bagi personel militer, serta kerja sama dalam bidang keamanan maritim dan penegakan hukum di laut. Hubungan pertahanan ini mencerminkan penerapan strategi hedging yang dijalankan Indonesia, yakni upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar dunia tanpa harus terikat pada aliansi militer formal (Oktaviano et al., 2020).

Namun, peningkatan kerja sama keamanan dengan Washington juga menimbulkan sensitivitas di Beijing, mengingat Amerika Serikat merupakan pesaing utama Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Kondisi ini menciptakan tekanan diplomatik bagi Indonesia dalam mempertahankan prinsip “bebas aktif”, di mana setiap langkah strategis harus diambil dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan (Bao, 2022).

Selain itu, Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar sekaligus salah satu investor utama di Indonesia, dengan investasi bernilai miliaran dolar di sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Ketergantungan ekonomi ini berpotensi mempersempit ruang manuver diplomatik Indonesia, karena Tiongkok memiliki *leverage* besar dalam bidang logistik dan energi nasional. Melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI), Beijing tidak hanya memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga memperluas pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui skema pembiayaan dan proyek infrastruktur berskala besar yang menciptakan hubungan ketergantungan ekonomi (Jasmin et al., 2025). Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, kondisi ini menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan otonomi diplomatiknya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan beragam, seperti memperluas kerja sama dengan mitra lain termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa guna menjaga kemandirian nasional serta memastikan stabilitas dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, dilema antara kepentingan ekonomi dan keamanan tetap menjadi tantangan besar. Ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN masih sangat signifikan, sementara tekanan dari Amerika Serikat untuk memperkuat komitmen keamanan kolektif juga terus meningkat. ASEAN berupaya mempertahankan posisi netral dengan menolak untuk berpihak serta memperkuat integrasi ekonomi dan kohesi internal guna menjaga sentralitasnya. Dalam konteks ini, langkah Indonesia untuk terus memperkuat peran sentral ASEAN menjadi strategi kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan sekaligus stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang dinamis (Zhu, 2023).

Arah kebijakan ke depan menuntut Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi yang lebih beragam dan berimbang agar tidak terlalu bergantung pada Tiongkok, sekaligus tetap mengoptimalkan kerja sama keamanan regional tanpa memicu ketegangan dengan Beijing. Upaya ini dapat diwujudkan

melalui pendekatan multilateral yang menekankan kolaborasi inklusif dan saling menguntungkan di kawasan Indo-Pasifik. Pemanfaatan platform seperti ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menjadi kunci penting dalam menjaga prinsip netralitas dan memperkuat posisi politik luar negeri bebas aktif (Yanuarti et al., 2020).

Tekanan Geopolitik dan Ekspektasi Internasional

Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus aktor kunci dalam ASEAN, Indonesia sering ditempatkan pada posisi yang diharapkan mampu menjadi penengah dan penjaga stabilitas kawasan. Negara-negara besar melihat Indonesia sebagai kekuatan moral dan diplomatik yang dapat meredakan ketegangan antara Washington dan Beijing, sehingga tekanan eksternal kerap muncul agar Indonesia mendukung agenda seperti Quad atau Belt and Road Initiative. Situasi ini menguji konsistensi Indonesia dalam mempertahankan prinsip non-alignment dan politik bebas aktif. Hal ini sejalan dengan analisis dalam jurnal yang menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu diarahkan pada upaya menjaga stabilitas kawasan melalui ASEAN dan mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan kekuatan besar, termasuk dengan menghindari keberpihakan yang dapat mengikis kedaulatan kebijakan nasional (Trijanjani et al., 2025).

Indonesia juga menghadapi tekanan internal dari sesama negara ASEAN untuk tetap menjaga sentralitas organisasi di tengah meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar. Perbedaan orientasi politik luar negeri di dalam ASEAN, di mana beberapa negara lebih condong pada Tiongkok sementara yang lain memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat yang menyebabkan kohesi kawasan menjadi rentan. Dalam situasi ini, Indonesia dipandang sebagai aktor kunci yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan menjaga kesatuan ASEAN agar tidak terpecah oleh kepentingan eksternal (Sinambela, 2020). Dinamika regional menuntut semakin pentingnya diplomasi kolaboratif dan partisipasi seluruh aktor kawasan, termasuk pemerintah nasional maupun sub-nasional, untuk menjaga stabilitas dan kepentingan kolektif ASEAN di tengah tekanan geopolitik global.

Strategi Kebijakan Yang Ditempuh Indonesia Dalam Menghadapi Dilema Netralitas

Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dalam menghadapi rivalitas dua kekuatan besar dunia, Indonesia menerapkan diplomasi yang dikenal sebagai *hedging strategy*, yaitu strategi penyeimbangan risiko antara Tiongkok dan Amerika Serikat tanpa harus berpihak pada salah satunya (Rizqi Rahmanillah et al., 2023). Pendekatan ini memberi ruang bagi Indonesia untuk tetap menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok sembari memperkuat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat serta negara-negara ASEAN. Konsep ini menggambarkan adaptasi prinsip politik bebas aktif terhadap dinamika geopolitik baru di Asia Tenggara, di mana faktor ketergantungan ekonomi dan kebutuhan keamanan saling berinteraksi dalam kerangka kebijakan luar negeri.

Strategi "*hedging plus*" Indonesia tidak hanya bertujuan menghindari keterikatan dengan blok kekuatan tertentu, tetapi juga menegaskan peran aktif Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang mendorong kerja sama multilateral berbasis ASEAN. Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya mempertahankan otonomi strategisnya, memperkuat diplomasi normatif, dan memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga meskipun persaingan antara Beijing dan Washington semakin meningkat (Anwar, 2023).

KESIMPULAN

Indonesia menghadapi dilema netralitas yang semakin kompleks di tengah meningkatnya Great Power Competition antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan utama, namun implementasinya menghadapi tekanan geopolitik, ekonomi, dan keamanan yang menuntut manuver diplomatik lebih adaptif. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Indonesia menerapkan strategi hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua kekuatan besar

tanpa berpihak secara langsung, demi melindungi kepentingan nasional dan otonomi strategis. Melalui strategi ini, Indonesia berupaya tetap aktif berkontribusi pada stabilitas kawasan dan memperkuat sentralitas ASEAN sebagai arena diplomasi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan politik luar negeri bebas aktif Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan, dan stabilitas regional. Pemanfaatan forum multilateral seperti ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menjadi kunci dalam mempertahankan netralitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai *middle power* yang berperan penting dalam meredam rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

REFERENSI

- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's Hedging Plus Policy In The Face Of China's Rise And The US-China Rivalry In The Indo-Pacific Region. *Pacific Review*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>
- Art, R. J., Schelling, T. C., & Hoffman, B. (2017). The Political Uses Of Forces. In *International Politics: Enduring Concepts And Contemporary Issues* (Vol. 13).
- Azmi, A. N., Bintang, R., Syarif, U., & Jakarta, H. (2024). PRINSIP BEBAS-AKTIF INDONESIA PADA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022. *Emerald: Journal Of Economics And Social Sciences*, 3(1).
- Bao, G. (2022). China-US Strategic Competition And Indonesia's Status Anxiety. *East Asian Affairs*, 02(02). <https://doi.org/10.1142/S2737557922500115>
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). How-To Conduct A Systematic Literature Review: A Quick Guide For Computer Science Research. *Methodsx*, 9. <https://doi.org/10.1016/J.Mex.2022.101895>
- Dzikiara Pesona Sadewa, & Falhan Hakiki. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1). <https://doi.org/10.55960/Jlri.V11i1.422>
- Effendi, M., Hartono, R., Susilo, T., Arismunandar, S., & Wahyudi, E. (2025). GEOPOLITIK KEPEMIMPINAN GLOBAL DAN KOMPETISI SUMBER DAYA: PERSPEKTIF INDO-PASIFIK DAN PETA ULANG DOKTRIN PERTAHANAN RI. *Sosial Dan Bisnis*, 3(7), 141–154.
- Gonzalez-Pujol, I. (2024). Theorising The Hedging Strategy: National Interests, Objectives, And Mixed Foreign Policy Instruments. *All Azimuth*, 13(2). <https://doi.org/10.20991/ALLAZIMUTH.1480020>
- Jasmin, I. A., Hosen, I., & Biswas, A. K. (2025). Geopolitical Chessboard: China's Belt And Road Initiative And Shifting Power Dynamics. In *Discover Global Society* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.1007/S44282-025-00200-W>
- Jatmiko, B. (2023). Indonesia's Defense Policy In The Great Power Competition Era. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 9(1). <https://doi.org/10.33172/Jp.V9i1.1276>
- Koga, K. (2025). Tactical Hedging As Coalition-Building Signal: The Evolution Of Quad And AUKUS In The Indo-Pacific. *British Journal Of Politics And International Relations*, 27(1), 109–134. <https://doi.org/10.1177/13691481241227840>
- Naja, M. S. (2025). Geostrategi Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Global: Ketahanan Nasional Dan Implementasi Politik Luar Negeri. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Eissn* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nugraheni, I. (2025). Dampak Persaingan Geopolitik Amerika Serikat Dan Tiongkok Terhadap Posisi Strategis Indonesia Di Asia Pasifik. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Eissn* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman. Helda. (2020). Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

- (Case Study: The ASEAN Outlook On The Indo-Pacific). *International Affairs And Global Strategy*. <https://doi.org/10.7176/Iags/80-04>
- Rizqi Rahmanillah, A., Putih Bastian, T., & Ihsan, R. (2023). Indonesia's South China Sea Policy: The Limits Of Hedging. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(11). <https://doi.org/10.57096/Edunity.V2i11.177>
- Sinambela, S. I. (2020). KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG). *Jurnal PIR: Power In International Relations*, 3(2). <https://doi.org/10.22303/Pir.3.2.2019.173-184>
- Subakdi, & Benedictus Roring, E. (2024). STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI WILAYAH NKRI DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH. *JURNAL HUKUM MODERN*, 6(3), 28–36. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>
- Sugiharto Sugiharto, Mulhady Putra, As-Syifa R.Ramdhani Tanjung, & Siti Hajar Sahari. (2025). Posisi Geopolitik Indonesia Dalam Konteks Hubungan Regional Asia Tenggara. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/Terang.V2i1.885>
- Syahdami, & Rofii, M. S. (2022). Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif Dan Lebih Dekat Ke Salah Satu Blok, Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia? *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/Jkskn.V5i1.10063>
- Trianjani, S., Yuman, D. A., Kamila, A. N., Negara, Y. D., Junaedi, S. N. R., Fasya, F., Cantiqha, K. D., Fairuz, M., Rizkiansyah, M. R. F., & Prabowo, A. R. (2025). Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11.
- Tsuchiya, R. (2024). Balance Of Power In A Conflict Model. *Economics Of Governance*, 25(3). <https://doi.org/10.1007/S10101-024-00318-8>
- Wati, E., & Ulpah, D. K. (2024). Tantangan Dan Peluang Strategis Geopolitik Indonesia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3).
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal Of Government Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.26618/Kjgs.V2i2.9487>
- Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 6(1).
- Yukawa, T. (2014). Balance Of Power Norm In International Society And Its Reason. *International Relations*, 14(176). https://doi.org/https://doi.org/10.11375/Kokusaiseiji.176_126
- Zhu, G. (2023). Challenges And Responses To ASEAN's "Strategy Of Balancing Great Powers" In The Context Of China-US Competition. *Journal Of Theory And Practice Of Social Science*, 3(9). [https://doi.org/10.53469/Jtpss.2023.03\(09\).07](https://doi.org/10.53469/Jtpss.2023.03(09).07)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

108

